

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arifin, Firmansyah, *et al.*, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Budiarjo, Miriam, 1982, *Masalah Kenegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ghoffer, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Gie, The Liang, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- H.S., Salim, *et al.*, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hanitjo Soemitro, Rony, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, A. Madjaedi, 2009, *Kontra Minyak dan Gas Bumi dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Huda, Ni'matul., 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad, 2001, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- J.L. Kriekhof., Valerine, 2000, *Metode Penelitian Hukum (Seri Buku Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

- Kunardi, Moh., dan Saragih, Bintan, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1996, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manullang, M., 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marbun, SF., dan MD., Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993,
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Penyelenggara Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muslimin, Amrah, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, et.al., 2000, *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratnawati, Tri, et.al., 2003, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang, Kendala, dan Implikasi* Pusat Penelitian LIPI, Jakarta.
- Rato, Domminikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, cetakan kedelapan, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri., 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sutratman dan Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Van Apeldoorn, L.J., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadimo, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Waridah, E., 2009, *EYD saku-*, Kawah Media, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta.
- Yasir, Armen, 2007, *Hukum Perundang-undangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019
- Nurbaningsih, Enny, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia, “ Kajian tentang Impelementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung”, *Makalah Seminar Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, 2011.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016.
- Sihombing, Eka Nam, “Jurnal Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10. No.2, 2017.
- Sismarwoto, Edy, “Kontestasi Norma Hak Gugat Pasien Dengan Norma Adekuat Dalam Pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Suharjono, Muhammad, “Jurnal Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.

Wicaksono, Dian Agung, “Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintahan Daerah”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015.

Zarkasi, A., “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, 2011.

C. Tugas Akhir

Buana, Mirza Satria, 2010, *Hubungan Tarik Menarik antara Asas Kepastian Hukum (legal certainty) dengan Asas Keadilan (substansial justice) dalam Putusan –Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Lestari, Lina Puji, 2018, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Mukhlis, 2014, *Fungsi dan Kedudukan Mukim sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Parsa, I Wayan, 2003, *Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Salsabila, Safira, 2017, *Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah oleh Cabang Kekuasaan Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 & Nomor 56/PUU-XIV-2016*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Artikel Internet

Alinea.id, “Komnas Perempuan: Perda Diskriminatif di Indonesia”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/komnas-perempuan-ada-235-perda-diskriminatif-di-indonesia-b1UAb9fxt>, diakses pada 20 Maret 2020.\

Kementerian Dalam Negeri, “Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/revisi”, diakses dari https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada 17 Maret 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: Pengawasan”, diakses dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pengawasan>, diakses pada 10 Juni 2019.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi,” diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=744>, diakses pada 20 Maret 2020.

Saldi Isra, “Penyelundupan Norma Hukum”, diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/366-penyelundupan-norma-hukum.html>, diakses pada 16 Maret 2020.

Sulaiman, “Problematisasi Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota”, diakses dari <https://jdih.babelprov.go.id/content/problematisasi-evaluasi-raperda-kabupatenkota>, pada 24 Maret 2020.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 655).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri

Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467).